

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang relasi industri yang terjalin antara buruh, PT Gudang Garam Tbk, dengan Pemerintah Kota Kediri, yang kemudian disebut sebagai pola hubungan tripartit. Dalam proses produksi, pihak perusahaan diwajibkan memiliki sarana hubungan industrial, salah satunya adalah memperbolehkan adanya serikat buruh dalam perusahaan. Relasi industri antara buruh dengan pihak perusahaan disebut sebagai bipartit, dalam hal ini kedua belah pihak harus membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk mengatur hak-hak dan kewajiban dari buruh maupun perusahaan. Jika terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, maka terjadilah konflik hubungan industrial. Tugas pokok fungsi pemerintah disini adalah mengawasi dan sebagai mediator jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Terdapat pengadilan arbitrase pada tingkat disnaker provinsi yang memiliki wewenang perihal penjatuhan sanksi. Ruang lingkup penelitian ini adalah peran pemerintah dalam proses berjalannya hubungan industrial. Analisa dalam penelitian ini menggunakan teori Hegemoni Antonio Gramsci, menggambarkan dominasi pihak PT Gudang Garam Tbk sebagai pemilik modal (borjuis) terhadap buruh sebagai faktor produksi (proletar). Kemudian menggunakan kritik Antonio Gramsci terhadap Marx bahwa faktor dominasi PT Gudang Garam tidak hanya disebabkan oleh kelebihan dalam hal ekonomi, namun juga hal lain seperti budaya dan ekonomi, mengibaratkan Pemerintah Kota Kediri sebagai pemberi payung proteksi terhadap perusahaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa peran pemerintah dalam fungsinya sebagai *stakeholder* dalam Lembaga Kerjasama Tripartit.

Kata kunci: *relasi industri, konflik hubungan industrial, LKS Tripartit, Gudang Garam.*

ABSTRACT

This study discusses the relation of the industry that exists between labor, PT Gudang Garam Tbk, with the Government of Kediri, which is then referred to as the pattern of tripartite relations. In the production process, the company is required to have the means of industrial relations, one of which is to allow the existence of trade unions within the company. The industrial relations between laborers and companies is referred to as bipartite, in which case both parties must establish a Collective Labor Agreement (*PKB*) to regulate the rights and obligations of both workers and companies. If there is a violation by either party, then there will be industrial relations conflict. The main task of government functions here is to oversee and mediate in case of disputes that can not be resolved internally. There is an arbitral tribunal at the provincial level that has authority over sanctions. The scope of this research is the role of government in the process of industrial relations. The analysis in this research using Antonio Gramsci Hegemony theory, that represents the dominance of PT Gudang Garam Tbk as the owner of capital (bourgeois) to the workers as a factor of production (proletarian). Then using criticism Antonio Gramsci to Marx that the dominant factor of Gudang Garam not only caused by the advantages in terms of economy, but also other things such as culture and economy, likens Kediri Government as a protector of protection of the company. The purpose of this research is to know and analyze the role of government in its function as stakeholder in Tripartite Cooperation Institution.

Keywords: *industrial relations, industrial relations conflicts, LKS Tripartit, Gudang Garam.*